

**AFILIASI:**¹Politeknik Negeri Bandung^{2,3}Universitas Padjadjaran***KORESPONDENSI:**

fitri1996@polban.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v12i2.6998](https://doi.org/10.32534/jpk.v12i2.6998)

CITATION:

Fitri, F., Yudianto, I., & Mulyani, S. (2025). Pengaruh Fiscal Stress dan Kapabilitas APIP terhadap Penyerapan Anggaran Pemda di Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 12(2), 345–359. <https://doi.org/10.32534/jpk.v12i2.6998>

Riwayat Artikel :**Artikel Masuk:**

19 Februari 2025

Di Review:

26 Maret 2025

Diterima:

30 Juni 2025

Pengaruh *Fiscal Stress* dan Kapabilitas APIP terhadap Penyerapan Anggaran Pemda di Indonesia

Fitri^{1*}, Ivan Yudianto², Sri Mulyani³**Abstrak**

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *fiscal stress* dan kapabilitas APIP terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kab/Kota di Indonesia.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah Pemerintah Daerah Kab/Kota di Indonesia. Sampel terdiri dari 74 Kab/Kota. Teknik pengumpulan data melalui tinjauan dokumen dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yaitu regresi linier berganda menggunakan alat bantu SPSS versi 23.0.

Temuan Utama - Fenomena rendahnya serapan anggaran di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan capaian penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sehingga menyebabkan pelayanan publik yang tidak optimal dan tidak terpenuhinya pertumbuhan ekonomi.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara *fiscal stress* dan penyerapan anggaran pemerintah daerah. Sedangkan kapabilitas APIP dan penyerapan anggaran pemerintah daerah terdapat pengaruh positif yang signifikan.

Kebaruan Penelitian - Kebaruan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian dan variabel *independent* (kapabilitas APIP).

Kata Kunci: Anggaran, *Fiscal Stress*, Kapabilitas APIP, Pemda, Penyerapan

Abstract

Main Purpose - This research aims to examine the influence of *fiscal stress* and APIP capability on district/city government budget absorption in Indonesia.

Method - This research uses quantitative methods. The research population is District/City Regional Governments in Indonesia. The sample consists of 74 districts/cities. Data collection techniques through document review and secondary data sources. The data analysis technique is multiple linear regression using SPSS version 23.0 tools.

Main Findings - The phenomenon of low budget absorption in Regency and City Regional Government agencies in Indonesia. This is because the achievement of budget absorption is less than 100%. This causes suboptimal public services and unfulfilled economic growth.

Theory and Practical Implications - The implications of this research show that there is a significant negative influence between *fiscal stress* and regional government budget absorption. Meanwhile, APIP capability and regional government budget absorption have a significant positive influence.

Novelty - The novelty of this research is in the research object and independent variables (APIP capabilities).

Keywords: Budget, *Fiscal Stress*, APIP Capability, Regional Government, Absorption

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 2000, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring waktu, kebijakan ini terus mengalami penyempurnaan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan utama dari penguatan otonomi daerah ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan secara efisien dan efektif. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah proses penganggaran, yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengelola dana publik serta mencerminkan kebijakan dan program yang dibiayai oleh anggaran publik. Pemerintah, sebagai pengelola utama, bertugas menyusun anggaran dan memastikan realisasi anggaran daerah berjalan sesuai rencana.

Namun, pemerintah daerah di Indonesia kini masih menghadapi masalah dalam mencapai target penyerapan anggaran sebesar 100 persen. Berdasarkan data pada tabel di bawah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, selama tiga tahun terakhir (2020 hingga 2022), realisasi belanja daerah oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia belum mencapai 100 persen.

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah

Tahun	Kota	Kabupaten
2020	81% (127,97 Triliun)	81,79% (578,51 Triliun)
2021	82,70% (136,95 Triliun)	85,18% (612,12 Triliun)
2022	86,86% (152,64 Triliun)	87,37% (658,75 Triliun)

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024

Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah sisa lebih perhitungan anggaran, *rebudgeting*, waktu penetapan anggaran, alokasi belanja murni, *fiscal stress*, dan pengawasan intern yang belum optimal. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan lebih mendalam mengenai faktor *fiscal stress* dan pengawasan intern pemerintah yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran.

Fiscal stress adalah tekanan keuangan yang terjadi karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pendapatan untuk mendanai pembangunan dan peningkatan kemandirian daerah. Banyak pemerintah daerah masih mengalami defisit anggaran. Hal ini mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran karena terbatasnya penerimaan pendapatan pemerintah daerah. Terjadinya *fiscal stress* pada satu periode anggaran, menimbulkan kurangnya penyerapan anggaran di periode anggaran yang sama dikarenakan terbatasnya penerimaan pendapatan pemerintah daerah di tahun berjalan.

Salah satu langkah untuk meningkatkan realisasi anggaran adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kapabilitas APIP dalam melakukan tugas pengawasan, termasuk anggaran pendapatan dan belanja, perlu ditingkatkan. Pemberdayaan APIP yang efektif dapat mensukseskan penyerapan anggaran yang maksimal pada periode anggaran tersebut. Hal ini dikarenakan adanya fungsi dari APIP itu sendiri sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Selain uraian dan fenomena diatas, masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian hubungan antara *fiscal stress* dan APIP terhadap serapan anggaran menjadi latar belakang perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut. Namun, dalam penelitian ini, indikator APIP yang digunakan yaitu kapabilitas APIP. Sehingga diharapkan penelitian ini mendapatkan bukti empiris yang lebih kuat pada masing-masing keterkaitannya. Dikarenakan kapabilitas APIP memiliki indikator-indikator yang lebih rinci dalam penilaian APIP.

KAJIAN PSTAKA

Teori Stewardship

Teori *Stewardship*, yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989, berlandaskan pada karakter dasar manusia seperti rasa percaya, kejujuran, tanggung jawab, serta integritas. Menurut Silvia Wulandari dan Eka Fauzihardani (2022) teori *Stewardship* menjelaskan hubungan antara *stewards* dan *principals*. *Stewards* bertindak sebagai manajemen yaitu pemerintah yang mengutamakan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan organisasi dan *principals* yaitu masyarakat. Secara sederhana, teori *Stewardship* menjelaskan adanya keterkaitan yang erat antara tingkat kepuasan masyarakat dan pencapaian kinerja organisasi. Teori ini relevan untuk diterapkan pada lembaga atau instansi pemerintah (sebagai *steward*) yang tidak berfokus pada keuntungan finansial, melainkan mengutamakan pemberian pelayanan terbaik kepada pihak yang dilayani, yaitu masyarakat (sebagai *principal*).

Said (2015:104) menegaskan bahwa “Teori *stewardship* merupakan peran pemerintah selaku manajemen yang bertanggung jawab atas kepuasan pelayanan publik”. Selaras dengan pernyataan Sudaryo (2017:54) yaitu “Teori *stewardship* mengacu pada situasi dimana manajemen bertindak untuk kepentingan pemilik (masyarakat) dengan pertimbangan logis memprioritaskan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan organisasi”. Salah satu sasaran utama organisasi adalah mengoptimalkan tingkat penyerapan anggaran oleh masing-masing pemerintah daerah. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah sebagai motor penggerak dalam pengelolaan serta pelaksanaan tanggung jawab pembangunan di wilayahnya. Dampaknya, pemerintah daerah diharapkan menjadi institusi yang mendapat kepercayaan publik, mampu mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna mewujudkan layanan publik yang berkualitas. Dalam penelitian ini, pendekatan teori *stewardship* digunakan oleh peneliti untuk menganalisis keterkaitan antara tekanan fiskal (*fiscal stress*) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran berperan penting dalam mewujudkan tujuan kemandirian daerah dalam pengelolaan anggaran dan pembelanjaan daerah. Menurut Noviwijaya dan Roham (2013) menyebutkan “Serapan anggaran adalah perbandingan anggaran pelaksanaan yang telah dikeluarkan atau dicapai dalam satu tahun anggaran”. Anfujatin (2016) mengungkapkan bahwa “Daya serap anggaran juga dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan seberapa sukses suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan”. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penyerapan anggaran adalah evaluasi kinerja yang dilakukan dalam periode tertentu (pelaksanaan anggaran). Semakin tinggi daya serap anggaran, maka dapat dikatakan semakin baik kinerja manajer publik.

Fiscal Stress

Tekanan fiskal muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur urusan internalnya secara mandiri dan mengelola aset daerah secara efektif guna meningkatkan kemandirian. Chapman

dalam Hanif Imam dan Suparno (2017) mengatakan *fiscal stress* muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan pelayanan publik di tingkat daerah. Kondisi ini terjadi saat penerimaan pemerintah daerah menurun, sementara permintaan masyarakat terhadap layanan publik terus meningkat. Situasi ini bisa disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan daerah, atau karena pemerintah pusat mewajibkan peningkatan pelayanan tanpa memberikan dukungan dana yang cukup untuk membiayai kewajiban tersebut. Menurut Septira (2019) "*Fiscal stress* yaitu kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui sumber daya yang tersedia". Sedangkan menurut Rianti Monalisa (2020) menyatakan bahwa *fiscal stress* diidentikkan dengan kondisi besarnya target pendapatan asli daerah yang ditetapkan pemerintah daerah, namun tidak dapat tercapai dalam tahun anggaran daerah tersebut.

Peneliti memahami bahwa *fiscal stress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangannya disertai ketidakmampuannya untuk meningkatkan pendapatan, sehingga pasokan barang dan jasa kepada masyarakat tidak terpenuhi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lhutfi Iqbal, Hamzah Ritchi, dkk (2019), respon pemerintah daerah terhadap *fiscal stress* antara lain: (1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Mengurangi pengeluaran; (3) Menggunakan dana cadangan likuidasi; dan (4) Pencairan pinjaman daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan lembaga dalam struktur pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan internal di tingkat pusat maupun daerah. Struktur APIP mencakup BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat di lingkungan kementerian dan lembaga tinggi negara, Inspektorat pada lembaga pemerintah non-departemen, serta inspektorat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk unit pengawasan internal pada badan hukum pemerintah lainnya. Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021, kapabilitas APIP dianggap krusial dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif dan berkualitas. Penilaian kapabilitas ini mencakup aspek dukungan, pelaksanaan kegiatan, dan mutu pengawasan. Hasil penilaian kapabilitas APIP diklasifikasikan ke dalam lima tingkat, mulai dari level 1 hingga level 5. Berikut ini adalah uraian karakteristik masing-masing level sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021:

Level 1 (Initial)

Kapabilitas APIP Level 1 menunjukkan bahwa organisasi APIP telah didirikan dan diberdayakan untuk menegakkan pengawasan internal. Level 1 Kapabilitas APIP merujuk pada tingkat paling dasar dalam Kerangka Kapabilitas APIP yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Indonesia. Kerangka ini mengukur sejauh mana efektivitas dan profesionalisme fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah. Kondisi ini menjadi dasar pengaturan aktivitas APIP, meskipun tidak didukung infrastruktur yang memadai (sumber daya manusia dan praktik profesional).

Level 2 (Structured)

Kapabilitas APIP Level 2 menggambarkan bahwa APIP telah melakukan tugas pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Level 2 Kapabilitas APIP disebut juga dengan tahap "*Repeatable / Berulang*", yaitu tingkat di mana fungsi pengawasan sudah mulai sistematis, meskipun belum sepenuhnya efektif dan optimal. Kegiatan pengawasan yang dilakukan belum memenuhi standar minimum dan praktik profesional yang dipersyaratkan. Ini merupakan tahapan transisi penting dari pengawasan yang bersifat reaktif ke arah yang lebih terstruktur dan berorientasi pada nilai tambah bagi organisasi.

Level 3 (*Delivered*)

Kapabilitas APIP Level 3 memperlihatkan bahwa APIP telah melakukan kegiatan pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai standar dan praktik profesional. Pada tingkat ini, kegiatan pengawasan tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi mulai memberikan nilai tambah melalui peran yang lebih strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan jaminan yang cukup untuk kepatuhan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta peningkatan tata kelola organisasi.

Level 4 (*Institutionalized*)

Kapabilitas APIP Level 4 menyatakan bahwa APIP terus menjadi mitra strategis organisasi. Selain itu, hasil pengawasan APIP dalam *Governance, Risk Management and Control* (GRC) menunjukkan penilaian atas peningkatan kualitas pengawasan yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada level 4 ini fungsi pengawasan internal sudah menjadi bagian integral dari sistem manajemen organisasi, dengan orientasi yang kuat pada pencapaian tujuan strategis serta pengelolaan risiko secara menyeluruh.

Level 5 (*Optimized*)

Kapabilitas APIP Level 5 yaitu bahwa APIP mampu memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi tercapai, termasuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pada tahap ini, fungsi pengawasan tidak hanya efektif dan strategis, tetapi juga dioptimalkan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Level ini disebut "Optimized (Teroptimalkan)".

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah

Fiscal stress menggambarkan kondisi ketika pemerintah tidak mampu meningkatkan pendapatan dan sekaligus gagal memenuhi kewajiban keuangannya, yang berdampak pada tidak optimalnya pengadaan barang dan pelayanan publik. Tingginya tingkat fiscal stress mencerminkan tingginya kebutuhan belanja daerah yang tidak sebanding dengan kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan yang memadai. Dengan kata lain, daerah yang mengalami fiscal stress tinggi memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan anggarannya dan mengalami kesulitan dalam meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tekanan fiskal yang berat kehilangan fleksibilitas anggaran, yang pada akhirnya menyebabkan belanja daerah tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan sumber daya keuangan. Junita Afrah dan Syukriy Abdullah (2016) mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh negatif pada *fiscal stress* terhadap perubahan belanja daerah. Sejalan dengan hasil penelitian Hanif Imam dan Suparno (2017) bahwa *fiscal stress* memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap serapan anggaran.

Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah

Pengawasan merupakan suatu proses untuk mengamati, mengikuti, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program kerja yang telah dirancang sebelumnya, dengan tujuan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Dalam konteks pemerintahan, fungsi pengawasan dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP bertanggung jawab mengawasi seluruh aktivitas pemerintahan, termasuk aspek keuangan yang tercermin dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penilaian terhadap kapabilitas APIP, yang merujuk pada tingkat kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, didukung dengan sistem dan mekanisme yang memadai agar hasil pengawasan yang dihasilkan

berkualitas dan berdampak optimal. Dibawah ini adalah pengaruh masing-masing kapabilitas level APIP terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah, antara lain:

Pengaruh level 1 APIP terhadap penyerapan anggaran

Pemerintah Daerah yang mendapatkan kapabilitas level 1 APIP dinyatakan telah memiliki organisasi APIP untuk diberdayakan menegakkan pengawasan internal. Namun, pada level 1 APIP ini, belum didukung oleh infrastruktur (SDM dan Praktik Profesional) yang memadai. Sehingga dengan kondisi tersebut dapat berpengaruh pada penyerapan anggaran suatu pemerintah daerah seperti tidak terpenuhinya SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan pengawasan terhadap belanja daerah. Dalam hal ini APIP belum bisa menjadi *early warning system* untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh level 2 APIP terhadap penyerapan anggaran

Kapabilitas APIP pada level 2 menunjukkan bahwa APIP di lingkungan Pemerintah Daerah telah menjalankan fungsi pengawasan dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar minimum dan praktik profesional yang ditetapkan. Akibatnya, kondisi ini berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran karena APIP belum mampu menjembatani kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang muncul di masing-masing unit instansi.

Pengaruh level 3 APIP terhadap penyerapan anggaran

Pemerintah Daerah dengan kapabilitas level 3 APIP menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivitas pengawasan oleh APIP sudah sesuai dengan standar dan praktik profesional. Sehingga pada kapabilitas level 3 APIP ini, penyerapan anggaran pada suatu pemerintah daerah sudah mulai stabil dan sesuai dengan rencana program yang telah disepakati pada setiap unit instansi. Kapabilitas level 3 APIP dalam mengawasi penyerapan anggaran pemerintah telah memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

Pengaruh level 4 APIP terhadap penyerapan anggaran

Kapabilitas level 4 APIP menunjukkan bahwa APIP telah menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah. Saat APIP mampu berperan dalam membantu pimpinan dan jajaran manajemen di pemerintah daerah, maka APIP telah berpengaruh menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan termasuk yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Selain itu, APIP menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus menerus dengan cara meningkatkan pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian keuangan daerah.

Pengaruh level 5 APIP terhadap penyerapan anggaran

Pemerintah Daerah yang memiliki APIP dengan kapabilitas pada level 5 menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan *assurance* yang memadai terhadap pencapaian tujuan pemerintahan daerah, termasuk dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran. Pada level ini, kapabilitas APIP turut mendukung pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional, perlindungan aset, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. APIP yang terorganisir dengan baik diharapkan mampu mengawal penyerapan anggaran dimulai dari perencanaan/*programming* di awal tahun sehingga di akhir tahun penyerapan anggaran dapat terealisasi 100%. Namun, jika APIP tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, maka pelaksanaan kegiatan di suatu pemerintah daerah tidak ada yang mengawasi, mereview dan mengevaluasi, sehingga hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi penyerapan anggaran yang tidak maksimal.

Hasil penelitian [Sudewi et al. \(2017\)](#) adalah “Pengawasan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran”. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian [Permata et al. \(2022\)](#) bahwa “Pengawasan berpengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran”.

Hipotesis

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini diajukan beberapa hipotesis antara lain:

H₁ : *Fiscal stress* berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

H₂ : Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

H₃ : *Fiscal stress* dan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah berpengaruh secara bersama-sama terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mengolah data dalam bentuk angka. Populasi yang menjadi objek penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia sebanyak 514 entitas. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu karena tidak semua pemerintah daerah memiliki data yang diperlukan secara lengkap selama lima tahun berturut-turut. Adapun kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah memiliki data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta laporan realisasi anggaran untuk periode 2018 hingga 2022; (2) Pemerintah Daerah mengalami *fiscal stress* secara konsisten selama lima tahun dari 2018 sampai 2022; dan (3) Pemerintah Daerah telah mendapatkan hasil penilaian atas kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selama kurun waktu tersebut. Berdasarkan kriteria tersebut, dari total 416 kabupaten dan 98 kota, diperoleh 74 pemerintah daerah yang menjadi sampel, terdiri atas 58 kabupaten dan 16 kota untuk tahun anggaran 2018–2022.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data dokumenter. Data kuantitatif mengacu pada informasi dalam bentuk angka, sedangkan data dokumenter berupa laporan-laporan tertulis. Adapun data yang digunakan meliputi Laporan Kinerja BPKP, data anggaran, serta laporan realisasi pendapatan dan belanja dari pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia selama periode 2018 hingga 2022 (data panel). Seluruh data yang dianalisis bersumber dari data sekunder, yang diperoleh langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, regresi linier berganda, serta uji hipotesis. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23.0, yang dipilih karena memiliki kapabilitas tinggi dalam mengolah dan menganalisis data statistik.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<i>Fiscal Stress</i>	Kondisi besarnya target pendapatan asli daerah yang ditetapkan pemerintah daerah, namun tidak dapat tercapai dalam tahun	$\frac{(Target\ PAD - Realisasi\ PAD)}{Target\ PAD} \times 100\%$ (Rianti Monalisa (2020), Wulandari Silvia dan Eka Fauzihardani (2022))	Rasio

	anggaran daerah tersebut.		
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Kemampuan auditor intern dalam melaksanakan tugas pengawasan diantaranya yaitu dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.	Level 1 : Organisasi APIP terbentuk dan memiliki mandat pengawasan. Level 2 : Dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM. Level 3 : Aktivitas pengawasan sesuai standar dan hasil pengawasan APIP yang berkualitas. Level 4 : APIP menjadi mitra strategis organisasi. Level 5 : Keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi.	Interval
(Peraturan BPKP No.8/2021)			
Penyerapan Anggaran	Pengukuran untuk menentukan seberapa sukses suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.	$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Anfujatin (2016), Wulandari Silvia dan Eka Fauzihardani (2022))	Rasio

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

HASIL

UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Dalam sistem kenegaraan Indonesia, terdapat berbagai lembaga penyelenggara pemerintahan yang bertugas mendukung jalannya pemerintahan pusat. Salah satunya adalah pembentukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan di wilayahnya masing-masing berdasarkan prinsip otonomi daerah. Struktur pemerintahan daerah di Indonesia dibagi ke dalam beberapa provinsi, yang selanjutnya terdiri atas kabupaten dan kota.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh sebanyak 58 pemerintah daerah kabupaten dan 16 pemerintah daerah kota, sehingga total ada 74 pemerintah daerah yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut oleh peneliti.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

<i>Fiscal Stress</i>		Kapabilitas APIP		Penyerapan Anggaran	
Min	-8,56	Min	1	Min	0,65
Max	0,86	Max	3	Max	1,39
Mean	0,02	Mean	2,31	Mean	0,94
St Dev	0,59	St Dev	0,59	St Dev	0,09

Sumber: Hasil Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 3 nilai minimum (nilai terendah) dari *fiscal stress* 74 Pemerintah Daerah Kab/Kota yang dijadikan sampel selama tahun 2018-2022 adalah -8,56 artinya nilai dibawah 0 bahwa

pemerintah daerah tersebut tidak memiliki *fiscal stress* namun memiliki nilai lebih dari target PAD nya sebesar 856%. Sedangkan untuk nilai maksimum (nilai tertinggi) *fiscal stress* sebesar 0,86 atau 86%. Nilai mean (nilai rata-rata) *fiscal stress* sebesar 0,02 dan nilai standar deviasinya yaitu 0,59.

Tabel 3 yang menjelaskan juga nilai minimum dari kapabilitas APIP 74 Pemerintah Daerah Kab/Kota selama tahun 2018-2022 adalah level 1. Sedangkan untuk nilai maksimum kapabilitas APIP berada pada level 3. Nilai rata-rata kapabilitas APIP sebesar 2,31 menunjukkan nilai yang lebih besar daripada nilai standar deviasinya yaitu 0,59.

Nilai minimum penyerapan anggaran 74 Pemerintah Daerah Kab/Kota selama tahun 2018-2022 adalah 0,65 atau 65%. Sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 1,39 atau 139%. Sementara itu, nilai rata-rata penyerapan anggaran sebesar 0,94 menunjukkan nilai yang lebih besar daripada nilai standar deviasinya yaitu 0,09.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
X1	.104	74	.057
X2	.103	74	.056
Y	.101	74	.058

Sumber : Hasil Output SPSS, 2024

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan variabel X1, X2, dan Y tidak mengikuti distribusi normal. Nilai p (Sig.) untuk semua variabel sedikit di atas 0,05 (masing-masing 0,057, 0,056, dan 0,058), yang berarti kita gagal menolak hipotesis nol pada tingkat signifikansi 0,05. Dengan kata lain, berdasarkan uji ini, kita dapat menganggap bahwa data dari ketiga variabel tersebut cukup dekat dengan distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	10.334	1.133		9.123	.000	
	X1						
	X2						
		-.289	.117	-.293	-2.469	.016	.899 1.112
		.244	.113	.256	2.164	.034	.899 1.112

Sumber : Hasil Output SPSS, 2024

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan tidak adanya masalah multikolinieritas yang signifikan antara variabel independen X1 dan X2 dalam model regresi. Nilai *tolerance* untuk X1 dan X2 adalah 0.899. Nilai ini mendekati 1, yang menunjukkan bahwa tidak ada tumpang tindih yang besar dalam menjelaskan varians variabel dependen (Y) antara kedua variabel independen. Semakin dekat nilai *tolerance* ke 1, semakin rendah kemungkinan adanya multikolinieritas. Nilai VIF untuk X1

dan X2 adalah 1.112. Nilai ini jauh di bawah ambang batas yang umumnya diterima yaitu 10. Nilai VIF yang rendah ini menegaskan kembali bahwa tidak ada masalah multikolinieritas yang serius.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	DW
1	.322 ^a	.104	.078	2.30235	1.977

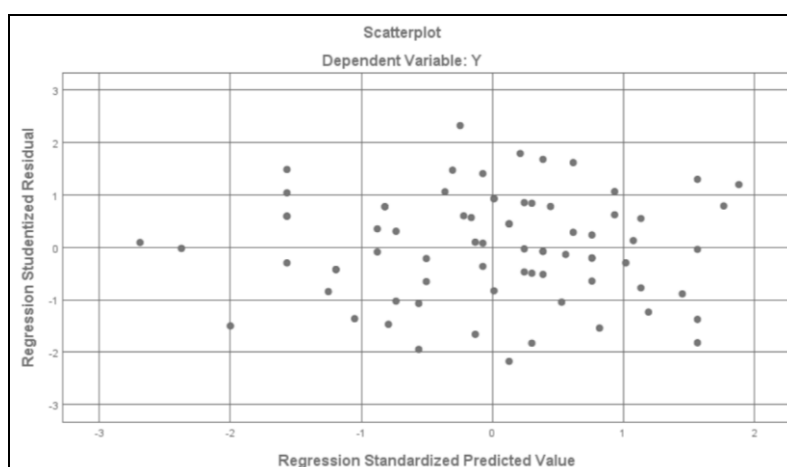
a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Output SPSS, 2024

Nilai DW sebesar 1.977 berada di antara batas atas ($dU = 1.65001$) dan $4 - dU$ (2.34999). Hal ini mengindikasikan tidak adanya autokorelasi positif atau negatif yang signifikan pada residual model.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Output SPSS, 2024

Homoskedastisitas terjadi ketika varians dari residual (selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual) relatif konstan di sepanjang rentang nilai prediksi. Dalam scatterplot ini, terlihat bahwa sebaran residual merata dan tidak membentuk pola tertentu seiring dengan meningkatnya nilai prediksi (*Regression Standardized Predicted Value*). Ini berarti varians residual cenderung stabil di sepanjang rentang nilai prediksi, yang merupakan tanda homoskedastisitas.

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.334	1.133		9.123	.000
	X1	-.289	.117	-.293	-2.469	.016

X2	.244	.113	.256	2.164	.034
-----------	------	------	------	-------	------

Sumber : Hasil Output SPSS, 2024

$$Y = 10,33 - 0,289X_1 + 0,244X_2$$

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa model yang diuji signifikan secara statistik (F-test signifikan pada alpha 0.05), mengindikasikan bahwa variabel independen X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen Y.

UJI HIPOTESIS

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.322 ^a	.104	.078	2.30235

Sumber : Hasil Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R² adalah 0,104. Hal itu berarti bahwa 10,4% variabel Penyerapan Anggaran (Y) dapat dijelaskan oleh variasi kedua variabel independen yaitu *Fiscal Stress* (X₁) dan Kapabilitas APIP (X₂), sedangkan sisanya 89,6% dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi.

Uji t

Tabel 9. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.334	1.133			9.123	.000
	X1	-.289	.117	-.293		-2.469	.016
	X2	.244	.113	.256		2.164	.034

Sumber : Hasil Output SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan sebagai berikut:

H1 Diterima: Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara X1 dan Y (t = -2.469, p < 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit X1 akan menyebabkan penurunan nilai Y sebesar 0.289, dengan asumsi X2 konstan.

H2 Diterima: Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara X2 dan Y (t = 2.164, p < 0.05). Artinya, setiap kenaikan satu unit X2 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0.244, dengan asumsi X1 konstan.

Uji Statistik F

Tabel 10. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	43.548	2	21.774	4.108	.021 ^b
Residual	376.357	71	5.301		
Total	419.905	73			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1, X1

Sumber : Hasil Output SPSS, 2024

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa model yang diuji signifikan secara statistik (F-test signifikan pada α 0.05), mengindikasikan bahwa variabel independen X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen Y.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship* dikarenakan bahwa pemerintah (sebagai pengelola) akan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat (pemilik) dalam mengatur keuangan negara, termasuk dalam penggunaan anggaran. Tekanan fiskal dapat memengaruhi perilaku pengelola, sedangkan kemampuan APIP berperan dalam menjamin penggunaan anggaran yang efisien dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengujian pada penelitian ini, diketahui bahwa *Fiscal stress* berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil dari data yang dianalisis sesuai dengan teori yang ada, bahwasannya salah satu faktor kurangnya penyerapan anggaran yaitu adanya risiko fiskal yang salah satu penyebabnya adalah realisasi PAD tidak sesuai dengan target PAD. Berdasarkan kajian dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, suatu Pemerintah Daerah dikatakan mengalami *fiscal stress* saat PAD nya memiliki defisit maksimal dua persen. Informasi mengenai *fiscal stress* yang terjadi pada tahun berjalan anggaran di Pemerintah Daerah dapat diperoleh dari hasil evaluasi bersama DPRD dalam pelaksanaan evaluasi triwulan satu dan dua. Jika suatu pemerintah daerah yang memiliki *fiscal stress* rendah berdasarkan evaluasi semester satu, maka akan lebih berpotensi melakukan penyerapan anggaran yang lebih baik karena memiliki fleksibilitas dalam penggunaan keuangannya. Sebaliknya, jika nilai *fiscal stress* tinggi maka penyerapan anggaran berpotensi lebih rendah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak lebih leluasa pada saat menggunakan keuangannya jika sumber daya yang tersedia tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil hipotesis penelitian untuk *fiscal stress* ini sesuai dengan penelitian [Junita et al. \(2016\)](#) yang mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh negatif pada *fiscal stress* terhadap perubahan belanja daerah. Hasil hipotesis juga diperkuat dengan hasil penelitian oleh [Hanif et al. \(2017\)](#) bahwa *fiscal stress* memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap serapan anggaran. Namun, tidak sepadan dengan hasil penelitian [Wulandari et al. \(2022\)](#) yang mengemukakan bahwa "*Fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran".

Selanjutnya, Kapabilitas APIP memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. [Rozai et al. \(2015\)](#) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah pengawasan intern yang tidak optimal. Sebagaimana diketahui bahwa APIP menjalankan perannya sebagai pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab pada pengawasan semua kinerja instansi pemerintah daerah termasuk keuangan. Di Indonesia, level kapabilitas APIP tertinggi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota yaitu level 3 sedangkan rata-rata level yang dimiliki Pemerintah Daerah Kab/Kota yaitu masih pada level 2. Level kapabilitas APIP yang rendah berdampak pada penyerapan anggaran yang rendah. Sedangkan, capaian level kapabilitas APIP yang tinggi menunjukkan pengawasan yang sudah baik dan diasumsikan pengawasan pada keuangannya pun sudah berjalan dengan baik sehingga penyerapan anggaran berpeluang menjadi lebih baik atau terserap seluruhnya. Baiknya APIP melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran setiap tiga bulan sekali, sehingga pelaksana anggaran di Pemerintah Daerah dapat mengatur kinerja keuangan dengan efektif dan efisien. Hasil hipotesis dari penelitian untuk Kapabilitas APIP sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [Sudewi et al. \(2017\)](#) yaitu "Pengawasan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran". Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian [Permata et al. \(2022\)](#) bahwa "Pengawasan berpengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran". Sedangkan, hasil

penelitian oleh Anggun Savitri (2016) mengungkapkan hasil penelitian yang berbeda bahwa pengawasan intern tidak berpengaruh terhadap tingkat serapan anggaran.

Oleh karena itu, *fiscal stress* dan kapabilitas APIP ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun, dua faktor ini dapat menjelaskan 10,4% variasi saja dalam penyerapan anggaran. Sedangkan, sisanya sebesar 89,6% dapat dijelaskan oleh faktor lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran (Anggriawan Ferdi, 2020; Wulandari Silvia, 2022; Sitaesmi Sekar, 2022; Setiawan Hanggara, 2022), waktu penetapan anggaran (Hanif Imam, 2017; Erlina, 2017), *rebudgeting* (Lestari Soraya, 2014; Eka Fauzihardani, 2022; Yusra et al. 2022), perencanaan anggaran, regulasi keuangan dan sumber daya manusia (Ramdhani Dadan, 2017; Salamah Siti, 2018; Ramadhani Rifka, 2019; Oktaliza Yola, 2020).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fiscal stress* berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan rendah atau besarnya *fiscal stress* yang terjadi dapat memicu penyerapan anggaran di pemerintah daerah. Selanjutnya, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Setiap level kapabilitas APIP memiliki karakteristik yang berbeda, semakin tinggi level yang dicapai maka semakin baik karakteristik kapabilitas APIP di pemerintah daerah tersebut dan semakin kuat dalam melakukan pengawasan. Sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan penyerapan anggaran. Oleh karena itu, *Fiscal stress* dan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

SARAN

Saran penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Saran Praktis : Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan sumber daya finansial dan mengoptimalkan pendapatan daerah seperti PAD. Kemudian, dapat memanfaatkan peran APIP untuk pengawasan keuangan dan penyerapan anggaran yang lebih baik.
2. Saran Teoritis : Penelitian selanjutnya perlu mengidentifikasi faktor-faktor lain yang belum diteliti seperti SiLPA, waktu penetapan anggaran, *rebudgeting*, perencanaan anggaran, regulasi keuangan dan sumber daya manusia. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengatasi keterbatasan dalam model penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan penyerapan anggaran berdasarkan kelompok belanja sehingga dapat diketahui masing-masing penyerapan anggarannya.

REFERENSI

- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *DIA, Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1-18.
<https://doi.org/10.30996/dia.v14i01.1014>
- Anggriawan, F. (2020). The Effect of Pure Expenditure Allocation. *Budget Change, and Previous Year Remaining Budget on The Budget Absorption In The Govermental Work Unit of Banda Aceh City, Aceh Province, Indonesia*, 2, 15-19.
https://www.gajrc.com/media/articles/GAJEB-_21_15-19.pdf
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/242789/peraturan-bpkp-no-8-tahun-2021>

- Erlina, A. S., & Muda, I. (2017). The analysis of the influencing factors of budget absorption. *International Journal of Economic Research*, 14(12), 287-300.
https://www.researchgate.net/profile/Iskandar-Muda/publication/320335376_The_Analysis_of_the_Influencing_Factors_of_Budget_Absorption/links/59de6155aca27247d794350b/The-Analysis-of-the-Influencing-Factors-of-Budget-Absorption.pdf?origin=journalDetail&_tp=eyJwYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Hanif, I. (2017). Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 107-115.
<https://media.neliti.com/media/publications/459256-none-1f243db6.pdf>
- Junita, A., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Fiscal Stress Dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 467-478.
<https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.10>
- Lestari, S., Abdullah, S., & Basri, H. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Murni Dan Alokasi Belanja Perubahan Terhadap Serapan Anggaran Kabupaten/Kota Di Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(3).
<https://jurnal.usk.ac.id/JAA/article/view/4437>
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2019). Bagaimana Pemerintah daerah merespon Fiscal Stress?. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 76-81.
<https://doi.org/10.36982/jiegm.v10i2.840>
- Noviwijaya, A., & Rohman, A. (2013). Pengaruh keragaman gender dan usia pejabat perbendaharaan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja (studi empiris pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Semarang I) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
<https://eprints.undip.ac.id/39709/1/NOVIWIJAYA.pdf>
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(2), 081-090.
<https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918>
- Permata, N., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2022). Pengaruh Perencanaan, Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Daya Serap Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 105-117.
<https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.19119>
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710-726.
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. *Jurnal riset akuntansi terpadu*, 10(1).
<http://dx.doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Rianti, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress (Tekanan Anggaran) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia (Doctoral dissertation, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA).

- Rozai, M. A. (2015). Pengaruh independensi, role stress, budaya lokal “ewuh pakewuh” terhadap profesionalisme pengawas internal pemerintah ditinjau dari teori etika profesi, teori peran dan teori budaya (Studi Empiris Pada Pengawas Dilingkungan Inspektorat Daerah Subosukowono (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Said, A. L. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam perspektif governance*. Deepublish.
- Salamah, S. (2018). Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 45-52. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21927>
- Savitri, A. (2016). *Pengaruh Kualitas DIPA, Sumber Daya Manusia, Partisipative Budgeting, dan Pengawasan Internal terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Payakumbuh)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang). <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-Kualitas-DIPA%2C-Sumber-Daya-Manusia%2C-dan-Savitri/61e2d318c29a88ad3c046a495aa7aaa47eaa2770>
- Septira, F., & Prawira, I. F. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 57-64.
- Setiawan, H. (2023). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing Tinggi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Tebing Tinggi). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(3), 425-445. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i3.9874.g4530>
- Sitairesmi, S., & Wahyudi, H. (2022). Pengaruh SiLPA dan PAD terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(1), 29-44. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1428>
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2017). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- Sudewi, K. N., Herawati, N. T., AK, S., Yuniarta, G. A., & AK, S. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2). https://web.archive.org/web/20180415094442id_/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/11596/7419
- Wulandari, S., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Fiscal Stress dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran dengan Rebudgeting sebagai Variabel Moderasi. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 4(1), 93-110. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.467>
- Yusra, M., Yunita, N. A., Mulyati, S., Rais, R. G. P., & Maharani, I. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 26(1), 235-239. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v26i1.1484>